



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

LAPORAN KINERJA

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM.

Laporan Kinerja (LKj) 2025 mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan dalam penyusunan kebijakan penanaman modal, penggalian informasi potensi dan peluang investasi daerah, peningkatan pelaku usaha dan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Laporan ini menjabarkan capaian kinerja yang dapat diwujudkan, hambatan dan tantangan yang ada, dan diharapkan dapat menjadi evaluasi perbaikan di kemudian hari.

Jakarta, 31 Januari 2026

Deputi Pengembangan
Iklim Penanaman Modal,

Riyatno



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal turut berkontribusi dalam pencapaian realisasi penanaman modal dengan menyusun 3 Sasaran Program dan 8 indikator kinerja dalam rangka pencapaian target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sasaran Program Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi (SP-1) Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal, (SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, dan (SP-3) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Pada tahun 2025, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang tergambar dalam masing-masing Sasaran Program (SP) serta Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

1. (SP-1) Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal
 - 1) (IK-1) Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti dengan realisasi mencapai 100,00% atau 125,00% dari target yang diberikan sebesar 80,00%;
 - 2) (IK-2) Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan realisasi mencapai 19,03% atau 190,30% dari target yang diberikan sebesar 10,00%;
 - 3) (IK-3) Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM dengan realisasi mencapai 5,35% atau 107,00% dari target diberikan sebesar 5,00%.
2. (SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dengan Indikator kinerja Indeks kualitas iklim penanaman modal dengan realisasi mencapai 3,60% atau 100,00% dari target yang diberikan sebesar 3,60%;
3. (SP-3) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan realisasi mencapai 77,70% atau 97,10% dari target yang diberikan sebesar 80,00%;
 - 2) Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan realisasi mencapai 100,00 atau 114,90% dari target yang diberikan sebesar 87,00%;
 - 3) Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan realisasi mencapai 83,57% atau 94,90% dari target yang diberikan sebesar 88,00%;



- 4) Indikator kinerja Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK sebesar 0,38% atau 92,40% dari target 5%.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal juga telah melaksanakan reformasi birokrasi dan alokasi anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel dengan hasil kinerja anggaran terealisasi sebesar 94,43% dari target.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABLE	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar belakang	10
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Aspek Strategis	14
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Laporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis	20
2.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan	20
2.1.2. Sasaran Strategis (SS)	22
2.1.3. Kebijakan atau strategi dalam Upaya pencapaian Kinerja	23
2.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	43
3.2. Realisasi Anggaran	45
3.3. Capaian Kinerja Anggaran	45
3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	50
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56
LAMPIRAN	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12
Gambar 2 Komposisi Pegawai Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Gambar 3 Komposisi Pegawai Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 4 Arah Kebijakan Strategis, Sasaran Program, Indikator kinerja Program dan target Indikator Kinerja Program Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029	43



DAFTAR TABLE

Table 1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Strategis Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025-2029	24
Table 2 Matriks Kegiatan Sasaran Strategis/Program, Indikator Kinerja dan Target Deputi PIPM Tahun 2025	27
Table 3 Kategorisasi Kinerja	28
Table 4 Matriks Anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025.....	28
Table 5 Perjanjian Kinerja Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Tahun 2025	29
Table 6 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Tahun 2025	30
Table 7 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 ..	31
Table 8 Matriks Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
Table 9 Perbandingan IKU tahun 2024 dan IKU tahun 2025	40
Table 10 Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) Deputi PIPM Tahun 2025	45
Table 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputi PIPM Tahun 2025	46



Araban
Desain Bidang Pengembangan
Ruten Penanaman Model
Rapat Koordinasi dan Diskusi Kegiatan Penanaman
Maret 2024
Tanggal: 17 Januari 2024





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian target nasional. Berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ini disusun untuk memberikan gambaran yang transparan dan terukur mengenai pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam memetakan serta mengoptimalkan keunggulan kompetitif daerah demi menarik investasi yang berkualitas.

Seiring dengan transformasi kelembagaan menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal memegang peran sentral dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Laporan Kinerja ini memuat evaluasi atas upaya Deputi dalam menjalankan mandat untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memastikan integrasi investasi dengan sektor hilirisasi demi nilai tambah nasional yang optimal. Melalui laporan ini, tercermin sejauh mana koordinasi pusat dan daerah telah berhasil menciptakan peluang investasi yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi momentum transformatif bagi ekosistem investasi di Indonesia dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagai garda terdepan dalam merespon perubahan regulasi tersebut, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal memegang peran sentral untuk memastikan transisi kebijakan berjalan optimal dan menciptakan standar pelayanan perizinan yang lebih sederhana, transparan dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pemangku kepentingan dan Kementerian Investasi dan

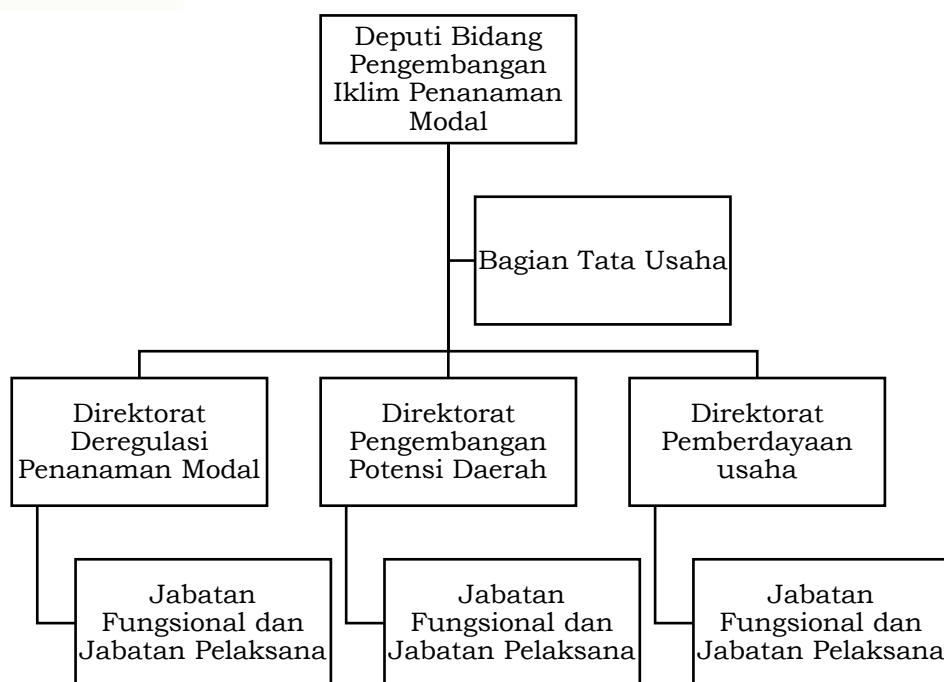


Hilirisasi/BKPM, khususnya upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. Melalui laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat sejauh mana kontribusi Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai unit yang bertanggungjawab atas koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perpres No. 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai salah satu pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, mempunyai tugas **“menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.** Untuk menjalankan tugas tersebut, unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan **fungsi-fungsi sebagai berikut:**

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- d. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh satu orang Deputi serta membawahi 3 Direktorat, masing-masing dipimpin oleh Direktur, sebagaimana terlihat pada bagan organisasi diatas ini.

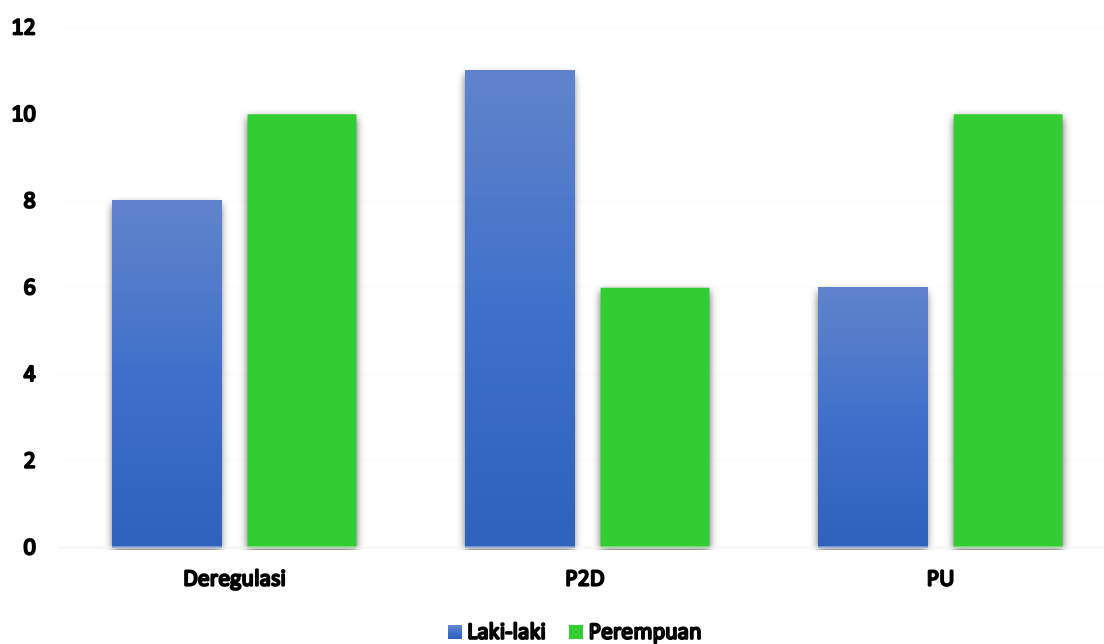
Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Desember 2025 berjumlah 51 orang, yang terdiri dari 1 orang Deputi, 3 orang Direktur, 9 Jabatan Fungsional Madya, 16 Jabatan Fungsional Muda, 19 orang Jabatan Fungsional Pertama, 1 orang Pengelola Data dan Informasi dan 2 orang Penata Layanan Operasional dengan proporsi pria sejumlah 26 orang dan wanita 26 orang. Dari segi pendidikan lulusan S3 sejumlah 1 orang, lulusan S2 sejumlah 16 orang, lulusan S1 sejumlah 33 orang, dan 1 orang SMA, sebagaimana tabel dan grafik terlampir:

Tabel 1 sumber daya manusia di lingkungan Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

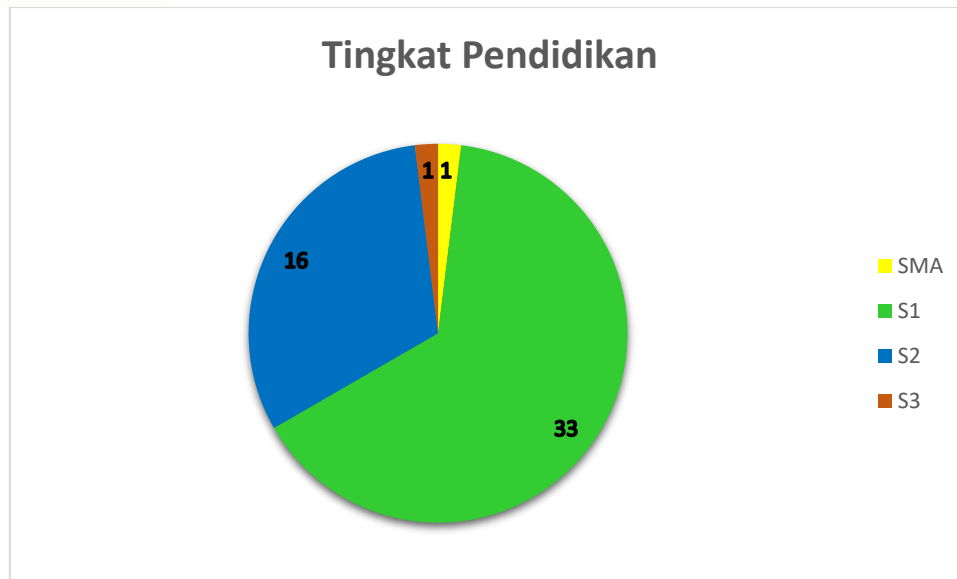
Jabatan		Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah (orang)
Eselon I	Deputi	1	0	1
Eselon II	Direktur	3	0	3
Jabatan Fungsional	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	5	4	9
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	6	10	16



Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	10	9	19
Jabatan Fungsional umum	Pengolah data dan informasi	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	0	2	2
Total		26	25	51



Gambar 2 Komposisi Pegawai Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3 Komposisi Pegawai Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen formal yang menyajikan data dan informasi mengenai capaian realisasi program serta kegiatan Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal selama Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuannya adalah sebagai sarana evaluasi atas efektivitas program hilirisasi investasi di tingkat daerah, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pemangku kepentingan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, khususnya upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. Melalui laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat sejauh mana kontribusi Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai unit yang bertanggungjawab atas koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal.

1.4. Aspek Strategis

Adapun beberapa aspek-aspek strategis, yaitu :

1. Sinkronisasi Kebijakan

Aspek ini menunjukkan bahwa Deputi tidak hanya fokus pada investasi secara umum, tetapi secara spesifik merancang iklim yang mendukung nilai tambah, Penyelarasan regulasi penanaman modal untuk mendukung rantai pasok industri hilir.

2. Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Penguatan kepastian hukum dan standarisasi perizinan pasca berlakunya PP 28/2025.

3. Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Sebagai fungsi koordinasi, Deputi berperan menjaga agar kebijakan di daerah tidak bertentangan dengan semangat reformasi di pusat.
4. Peningkatan Daya Saing Investasi Global
Aspek ini mengaitkan kinerja Deputi dengan posisi Indonesia di mata investor internasional dengan memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha dan daya saing global.
5. Transformasi Digital dan Optimalisasi Sistem (Sistem OSS).
kebijakan pengembangan iklim investasi saat ini sangat bergantung pada sistem, aspek ini sangat strategis.

1.5. Isu Strategis

Pada pemerintahan periode 2025-2029 di target investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target investasi ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Asta Cita Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, pengembangan industri kreatif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan menjadi bagian integral dari strategi ini. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, termasuk di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Visi dari Asta Cita ini berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, terutama dalam melanjutkan agenda hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam mencapai target tersebut Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal masih menghadapi beberapa permasalahan sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Sinkronisasi Regulasi Pasca Terbitnya PP 28/2025
Isu ini berkaitan dengan masa transisi. Perubahan dari aturan lama ke PP 28/2025 memerlukan harmonisasi cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kebingungan di lapangan.
2. Integrasi Kebijakan Investasi dengan Peta Jalan Hilirisasi
Sesuai nomenklatur baru kementerian, iklim investasi tidak lagi sekadar mudah, tapi harus terarah menuju hilirisasi.



3. Standarisasi Pelayanan dan Pengawasan di Daerah (NSPK)
Meskipun perizinan ditarik ke sistem pusat (OSS), pelaksanaan di lapangan seringkali terkendala aturan daerah yang belum sinkron.
4. Peningkatan Kualitas Investasi (Inklusif dan Berkelanjutan)
Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal yang mengarusutamakan investasi hijau (green investment) dan kemitraan dengan UMKM lokal.
5. Optimalisasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (Digitalisasi)
Kebijakan pengembangan iklim harus didukung oleh keandalan teknologi informasi. Selanjutnya dapat melakukan Evaluasi dan pengembangan kebijakan yang mendukung keandalan sistem perizinan berbasis risiko agar lebih user-friendly namun tetap ketat dalam pengawasan.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Pendahuluan,

Menyajikan informasi mengenai Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan apa yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 secara umum, terdiri dari sub-sub bab:

Latar Belakang

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Maksud dan Tujuan

Aspek Strategis

Isu Strategis

Sistematika Laporan

Perencanaan Kinerja,

Menyajikan informasi mengenai penyusunan dokumen perencanaan kinerja dari mulai dokumen Rencana Strategis (jangka menengah 2020-2024), dokumen rencana kerja (tahunan) hingga ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024, terdiri dari sub-sub bab:

Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja,

Menyajikan informasi terkait dengan pelaksanaan – monitoring – evaluasi Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024, terdiri dari sub-sub bab:

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Anggaran



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja,

Menyajikan informasi terkait dengan upaya peningkatan kinerja dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2025 dan kinerja lain-lain yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di sepanjang tahun 2025 sebagai wujud perbaikan berkesinambungan.

Penutup

Menyajikan informasi dan arahan dari pimpinan sehubungan dengan kinerja tahun 2025. Terdiri dari subbab:

Kesimpulan

Saran







BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Sesuai dengan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu “Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045” yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode tahun 2025-2029, memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang mengenai peran dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Konsistensi kinerja selama periode tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dukungan dari tiap unit ke deputian yang ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maka sudah merupakan kewajiban bagi Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dimaksud.

Berdasarkan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2025-2029, Visi Unit Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 yang juga merupakan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja, yaitu:

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Makna Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah lembaga pemerintah yang menjadi leading sektor di bidang penanaman modal di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Makna Yang Kondusif adalah kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang mendukung, aman, dan menguntungkan bagi investor untuk menanamkan modal, dengan biaya & risiko rendah, memperoleh keuntungan tinggi, dan adanya kepastian hukum serta kemudahan perizinan, didukung sinergi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Ini menciptakan ekosistem yang membuat investor merasa yakin dan nyaman untuk berinvestasi dalam jangka panjang karena ada stabilitas, infrastruktur memadai, dan tata kelola yang baik.

Visi Kedeputan Iklim Penanaman Modal bahwa kondusifitas iklim penanaman modal harus diukur dari kemampuannya untuk menarik investasi yang transformasional dan berkualitas tinggi. Ini berarti fokus pada: Kepastian: Stabilitas regulasi, hukum, dan birokrasi yang dapat diprediksi. Efisiensi: Kemudahan dan kecepatan perizinan (OSS) serta logistik. Keberlanjutan: Investasi yang mendukung Hilirisasi Industri, padat teknologi, berorientasi ekspor, dan sejalan dengan prinsip ESG.

Arah Strategis Jelas yaitu Mendukung Indonesia Emas 2045 yaitu Segala program dan kebijakan pengembangan iklim investasi harus memiliki orientasi tunggal menuju pencapaian status negara maju pada tahun 2045. Kesimpulannya, pengembangan iklim penanaman modal adalah instrumen utama untuk: Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas. Meningkatkan Daya Saing Global Indonesia. Melakukan Transformasi Ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah.

Peran Aktif dan Terukur (*The Enabler Role*): Kesimpulan ini menempatkan Kedeputan bukan hanya sebagai administrator perizinan, tetapi sebagai fasilitator dan pemecah masalah (*problem solver*) bagi investor. Ini membutuhkan pendekatan yang proaktif, terintegrasi, dan terukur untuk memastikan bahwa iklim investasi yang kondusif benar-benar terwujud di lapangan, dan dampaknya dapat dilihat pada indikator ekonomi makro dan mikro yang positif.

Dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 utamanya berperan dalam mendukung pencapaian misi (Prioritas Nasional) ke-5 yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” karena semua Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) Kementerian Investasi mendukung misi (Prioritas Nasional) ke-5 tersebut. Selain itu, beberapa Rincian Output Nasional juga mendukung misi (Prioritas Nasional) ke-2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, serta juga berkomitmen dalam mendukung misi (Prioritas Nasional) ke-7 yaitu “Memperkuat Reformasi



Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Berdasarkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dan dukungan terhadap misi RPJMN 2025-2029, serta tugas dan fungsi Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, maka rumusan misi untuk mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029, yaitu:

“Mengakselerasi Peningkatan Iklim Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”

Makna mengakselerasi menunjukkan urgensi untuk mempercepat proses peningkatan investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan penanaman modal, akan berupaya secara akseleratif untuk meningkatkan penanaman modal yang lebih tinggi. Kinerja penanaman modal yang optimal diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Akselerasi perluasan penanaman modal termasuk investasi hilirisasi strategis dilakukan untuk mendorong upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penanaman modal diharapkan dapat mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, menekankan pentingnya pengembangan pasar dalam negeri yang kuat dan terintegrasi. Misi ini juga bertujuan untuk memperluas pasar ke tingkat global, meningkatkan ekspor, dan menarik investasi asing. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai nilai global yang lebih kompleks, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Misi utama Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah mengakselerasi perbaikan lingkungan investasi di Indonesia agar menjadi lebih menarik, kompetitif, dan terintegrasi, yang Diharapkan:

- a. Peningkatan Realisasi Investasi (PMA & PMDN) yang berkualitas.
- b. Perbaikan Daya Saing dan Kemudahan Berusaha.
- c. Pemerataan Ekonomi melalui distribusi investasi yang lebih luas.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan ke dalam ***tujuan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM*** dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 adalah ***Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan.***

2.1.2.Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa sasaran program. Sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan mempertimbangkan tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. (SS-1) Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata dengan 7 indikator yang meliputi:
 - 1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder;
 - 2) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi;
 - 3) Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM;
 - 4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor;
 - 5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor;
 - 6) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan; serta
 - 7) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa.
- b. (SS-2) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima, dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2.1.3. Kebijakan atau strategi dalam Upaya pencapaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Ada 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
- b. Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal;
- c. Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Sesuai rencana strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029, unit Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal diharapkan dapat melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal dalam bentuk output peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal, pengembangan potensi penanaman modal daerah dan pemberdayaan usaha nasional khususnya keterlibatan UMKM di daerah sehingga dapat tercapai peningkatan realisasi penanaman modal dan lebih meningkatnya



kepercayaan pelaku usaha baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian indikator dan target oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana tabel dibawah ini.

Table 1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Strategis Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran Program	Indikator Program
Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal	1. Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti
	2. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri		Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM
	3. Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman		Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah

a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan ukuran esensial untuk menilai keberhasilan pelaksanaan strategi penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran. Pengukuran ini ditujukan untuk memantau efektivitas

peran Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai unit perumus dan koordinator kebijakan dalam kerangka deregulasi, termasuk melalui pelaksanaan evaluasi atas kebijakan insentif yang telah berjalan, identifikasi peluang pengembangan insentif baru yang adaptif terhadap dinamika dan perkembangan ekonomi global, serta pengusulan dan sinkronisasi rekomendasi teknis kebijakan sektor usaha lintas kementerian/lembaga guna mendukung percepatan dan kemudahan berusaha, khususnya pada sektor prioritas dan kegiatan hilirisasi.

Penguatan iklim penanaman modal yang kondusif ditentukan oleh kualitas dan daya laku rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang diusulkan kepada pemangku kepentingan terkait, baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dengan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui penetapan regulasi, penyesuaian prosedur, dan/atau implementasi praktis. Tindak lanjut tersebut mencakup antara lain perubahan regulasi yang mendorong percepatan proses perizinan berusaha, penguatan ekosistem penanaman modal yang terintegrasi melalui penciptaan kepastian hukum, serta optimalisasi insentif fiskal, khususnya Tax Holiday. Peningkatan capaian indikator ini mencerminkan tingkat akseptabilitas, relevansi, dan kepastian implementasi rekomendasi kebijakan yang dirumuskan, yang selanjutnya berkontribusi terhadap penurunan hambatan investasi, penyederhanaan proses perizinan berusaha, dan peningkatan kepastian kemudahan berusaha.

b. Persentase Peningkatan Kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM

Indikator ini merupakan instrumen pengukuran utama dalam mendukung strategi Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri, sekaligus mengimplementasikan prinsip investasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui fungsi pemberdayaan usaha. Penguatan tata kelola pemberdayaan usaha menuntut adanya mekanisme kemitraan yang memiliki kerangka regulasi yang pasti, proses yang mudah, dan dapat diakses secara luas oleh pelaku usaha di daerah. Indikator ini mengukur pertumbuhan kuantitas dan/atau kualitas hubungan usaha yang terjalin antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang didukung oleh regulasi yang jelas dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Peningkatan persentase kemitraan menunjukkan keberhasilan Deputy Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam menciptakan tata kelola kemitraan yang efektif, di mana investasi skala besar memberikan dampak langsung pada penguatan struktur UMKM.

c. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah



Indikator ini merupakan tolok ukur efektivitas dari strategi Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal, yang merupakan fungsi inti dari pengembangan potensi daerah. Kualitas dan ketersediaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di daerah merupakan faktor penentu dalam mengarahkan investasi berkualitas dan mendorong pemerataan wilayah. Indikator ini mengukur seberapa efektif profil dan peta investasi yang disusun dan disebarluaskan oleh Deputy digunakan sebagai referensi utama oleh calon investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan investasi. Pemanfaatan di sini dapat diukur dari metrik seperti jumlah akses data, rujukan dalam studi kelayakan, atau dampak langsung terhadap penarikan minat investor ke lokasi non-tradisional. Peningkatan persentase pemanfaatan menunjukkan keberhasilan Deputy dalam menyediakan informasi investasi yang akurat, komprehensif, dan investable, yang pada akhirnya akan memperkuat sinergi antara potensi daerah dengan minat investor, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya tarik penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dan tata kelola ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang masuk dalam prioritas nasional pada tahun 2025 adalah: Prioritas Nasional (PN) tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Daya Saing Investasi
- b. Harmonisasi Regulasi terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah
- c. Sinkronisasi Kebijakan Investasi
- d. Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi Rendah
- e. Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok

Berdasarkan peran strategis Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah ditetapkan rencana kerja rencana anggaran tahun anggaran 2025 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) hal ini berdasarkan Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan



diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$NKO = \Sigma (\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Dengan penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah

- Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120
- Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan realisasi Investasi sebesar Rp1.905,6 triliun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 2 Matriks Kegiatan Sasaran Strategis/Program, Indikator Kinerja dan Target Deputy PIPM Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	1	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		2	Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah	10,00
		3	Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%)	5,00
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	4	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,60
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pengembangan Iklim	87,00



			Penanaman Modal (Nilai)	
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	88,00
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5,00

Pengukuran kinerja sasaran strategi yang telah ditetapkan dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis. Tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dikelompokkan ke dalam lima kategori seperti pada table 3 sebagai berikut:

Table 3 Kategorisasi Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kode	Kategori
1.	$X > 100\%$	Biru	ISTIMEWA
2.	$80\% < X \leq 100\%$	Hijau	BAIK
3.	$60\% < X \leq 80\%$	Kuning	BUTUH PERBAIKAN
4.	$20\% < X \leq 60\%$	Oranye	KURANG
5.	$0\% \leq X \leq 20\%$	Merah	SANGAT KURANG

Berdasarkan pengalokasian anggaran Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2025 sebesar Rp 10.528.946.000,- dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 4 Matriks Anggaran Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	2.982.792.000
2	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	2.698.996.000
3	Pemberdayaan Usaha Nasional	4.847.158.000
Total Anggaran Tahun 2025		10.528.946.000



Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA-065.01.1.664848/2025 tanggal 02 Desember 2024, pengalokasian anggaran Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024 sebesar Rp13.566.057.000,-. Dari anggaran yang dialokasikan, terdapat Penghematan Anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.735.691.000. Selanjutnya, pada bulan Juni 2025 terdapat penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No. S-273/AG/AG.5/2025 tanggal 5 Juni 2025 sebesar Rp4.337.080.000,-, sehingga total anggaran Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2025 menjadi sebesar Rp8.167.446.000,- sebagaimana tercantum pada 4. Matriks Anggaran Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025.

Untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang pengembangan Iklim Penanaman Modal, disusun dan dijabarkan perjanjian kinerja untuk Unit Kerja Eselon II di bawahnya yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Direktorat. Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh tiga Direktorat, yaitu Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah dan Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Perjanjian kinerja pada Direktorat Deregulasi Penanaman Modal yang mencakup kegiatan perbaikan regulasi dan insentif, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, pelaksanaan koordinasi pada pusat dan daerah sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini.

Table 5 Perjanjian Kinerja Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kualitas iklim penanaman modal	1	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		2	Persentase rekomendasi kebijakan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di pusat dan di daerah yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		3	Persentase rekomendasi terkait sinkronisasi kebijakan investasi yang ditindaklanjuti (%)	80,00
2	Meningkatnya kualitas deregulasi penanaman modal	4	Indeks kepuasan atas layanan konsultasi/asistensi terkait kebijakan (indeks)	3,60



3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	82,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (nilai)	75,00
		7	Persentase realisasi anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (%)	98,00
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal TA 2024 (%)	5,00

Perjanjian kinerja pada Direktorat Pengembangan Potensi Daerah yang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagai acuan bagi pemerintah daerah menyusun potensi dan peluang investasinya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang terdiri dari Panduan Penyusunan Potensi Sektor dan Peluang Investasi Daerah dan Panduan Teknis Pengisian Profil Sektor Unggulan dan Peluang Investasi Daerah, selain itu juga Direktorat PPD memfasilitasi daerah dalam penyusunan memo info di 10 daerah dengan pendekatan berbasis spasial sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

Table 6 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas potensi penanaman modal dan hilirisasi di daerah	1	Persentase daerah yang data potensi penanaman modal dan hilirisasi yang termutakhirkan sesuai kriteria (%)	100,00
2	Meningkatnya kualitas informasi potensi investasi di daerah	2	Indeks kualitas informasi potensi investasi di daerah (indeks)	3,40
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah	3	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	82,00
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (nilai)	75,00
		5	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (%)	98,00



		6	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah TA 2023 (%)	5,00
--	--	---	--	------

Perjanjian kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Usaha yang mencakup kegiatan pemberdayaan usaha melalui peningkatan kemitraan UKM dengan perusahaan besar sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

Table 7 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM	1	Persentase kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar terhadap komitmen kemitraan dari Usaha Besar (%)	25,00
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi Kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM	2	Persentase Pelaku UMKM yang telah dilakukan penguatan kapasitas untuk mendukung rantai pasok Usaha Besar (UB) (%)	100,00
		3	Indeks kepuasan pelaku usaha atas fasilitasi kemitraan (indeks)	3,63
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha	4	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	82,00
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Pemberdayaan Usaha (nilai)	75,00
		6	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	98,00
		7	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha TA 2024 (%)	5







BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui harmonisasi kebijakan dan mempersatukan visi terkait target investasi, perbaikan ekosistem investasi, pengimplementasian atas keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam yang berorientasi ekspor, penataan perizinan berusaha yang ideal, serta reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang masuk dalam prioritas nasional pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Daya Saing Investasi
2. Harmonisasi Regulasi terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah
3. Sinkronisasi Kebijakan Investasi
4. Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi Rendah
5. Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok

Untuk melihat keberhasilan kinerja organisasi dapat dilakukan pengukuran berdasarkan perbandingan antara rencana kinerja dengan capaian kinerja pada tahun 2025. Capaian nilai kinerja Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 8 Matriks Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	80,00	100,00	125,00%	110,00%	10,00%	99,00%
		Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah (%)	10,00	19,03	190,30%	110,00%	10,00%	99,00%
		Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%)	5,00	5,35	107,00%	107,00%	10,00%	96,30%
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,60	3,61	100,28%	100,28%	10,00%	90,25%
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00	77,70	97,13%	97,13%	10,00%	87,42%



	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	87,00	100,00	114,94%	110,00%	10,00%	99,00%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	88,00	83,57	94,97%	94,97%	10,00%	85,47%
	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5,00	0,38	110,00%	110,00%	10,00%	99,00%
Total Capaian PK							755,44%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK							94,43%
Predikat PKO							BAIK

Adapun penjelasan capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal. Sasaran peningkatan kualitas iklim penanaman modal capaian peningkatannya dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) merupakan kelanjutan dari agenda panjang reformasi iklim investasi yang secara bertahap telah dibangun sejak periode 2020–2024. Pada periode sebelumnya, keberhasilan Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi dinilai berdasarkan jumlah prosedur dan kecepatan memulai usaha (starting a business) dalam kerangka penilaian Ease of Doing Business (EoDB) yang menjadi indikator nasional dalam Renstra BKPM dan RPJMN 2020–2024. Melalui implementasi sistem Online Single Submission (OSS), Indonesia berhasil menurunkan waktu penyelesaian perizinan memulai usaha menjadi 2,5 hari dan menyederhanakan menjadi hanya 2 prosedur. Capaian tersebut dikategorikan sangat baik dan menjadi fondasi awal bagi transformasi sistemik menuju pengukuran iklim investasi yang lebih komprehensif. Memasuki tahun 2023, Bank Dunia secara resmi memperkenalkan metodologi baru bernama Business Ready (B-Ready) yang menggantikan EoDB. Berbeda dengan EoDB yang lebih berfokus pada prosedur formal untuk memulai usaha, metode B-Ready menilai seluruh aspek regulasi dan layanan pemerintah yang memengaruhi perkembangan sektor usaha secara keseluruhan. Penilaian dilakukan berdasarkan 10 topik utama, yaitu business entry, business location, utility services, labor, financial services, international trade, taxation, dispute resolution, market competition, dan business insolvency.



Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua mekanisme: konsultasi ahli (Expert Consultation) yang diperbarui setiap tahun, serta survei tingkat perusahaan (Enterprise Survey) yang diperbarui per siklus tiga tahunan. Siklus penilaian ini menempatkan B-Ready sebagai instrumen evaluasi ekosistem investasi yang lebih dinamis, lebih luas cakupan topiknya, serta lebih realistis dalam menggambarkan pengalaman dunia usaha.

Hasil Survei B-Ready Tahap Pertama dirilis pada tahun 2024 dan menempatkan Indonesia pada skor 64 dari 100. Pada tahun tersebut, capaian peningkatan kualitas iklim penanaman modal oleh Direktorat direfleksikan melalui indikator persentase rekomendasi perbaikan kebijakan/regulasi, yaitu delapan rekomendasi kebijakan yang berhasil diselesaikan (sangat baik), meningkat dari empat rekomendasi pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas fungsi advokasi kebijakan Direktorat dalam memperkuat ekosistem investasi berbasis regulasi dan pelayanan publik.

Memasuki tahun 2025, arah kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada harmonisasi kebijakan, penyatuan visi target investasi nasional, keberlanjutan hilirisasi SDA berorientasi ekspor, penataan perizinan berusaha yang ideal, serta reformasi birokrasi yang semakin adaptif. Dalam kerangka ini, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal mendapatkan mandat untuk menjalankan tiga kegiatan prioritas nasional, yaitu peningkatan daya saing investasi berbasis metodologi B-Ready, harmonisasi regulasi perizinan berusaha di pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan investasi lintas K/L dan daerah. Pada kegiatan peningkatan daya saing investasi, Direktorat menghasilkan empat rekomendasi strategis: penyusunan Rencana Aksi B-Ready 2025, masukan terhadap perubahan Perpres 10/2021 jo. 49/2021, masukan revisi PMK 69/2024 (Tax Holiday), serta rekomendasi terkait Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah dan Iklim Usaha. Rekomendasi lainnya masih terus dikembangkan, termasuk masukan dalam perundingan perdagangan internasional (ACAFTA, IA-CEPA), bahan analisis KPPI mengenai BMTP, kebijakan tarif AS, isu non-tarif USTR, serta dokumen lintas sektor lainnya. Kinerja ini menunjukkan bahwa metode B-Ready telah menjadi rujukan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis data, lebih responsif, dan lebih mencerminkan kebutuhan sektor usaha.

Pada aspek harmonisasi regulasi perizinan berusaha, dari target satu rekomendasi, Direktorat berhasil menyelesaikan empat rekomendasi utama, yaitu terbitnya PP 28/2025 tentang PBBR, Permeninvesthil/BKPM 5/2025 tentang PBBR dan fasilitas penanaman modal melalui OSS, masukan strategis terhadap PP 39/2025 sektor minerba, serta masukan dalam penyusunan KBLI 2025. Sejumlah regulasi lain tetap dikawal secara aktif hingga

tahapan harmonisasi di berbagai sektor seperti penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, tata kelola data, perindustrian, hingga penyusunan Pergub Jawa Barat terkait investasi. Hal ini menegaskan peran Direktorat sebagai clearing house yang memastikan seluruh regulasi tetap selaras dengan prinsip kemudahan berusaha, konsistensi sektoral, serta mendukung transformasi digital perizinan. Pada kegiatan sinkronisasi kebijakan investasi, target satu rekomendasi tercapai melalui fasilitasi layanan konsultasi dan asistensi kebijakan kepada asosiasi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Tahun 2025 juga mencatat tingginya permintaan konsultasi tertulis melalui Letter of Intent (LOI) dengan jumlah 257 LOI yang ditindaklanjuti oleh Direktorat. Permintaan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap kapasitas Direktorat sebagai rujukan utama penyelesaian isu investasi lintas sektor.

Sementara itu, hasil Survei B-Ready Tahap Kedua yang dirilis pada akhir 2025 menunjukkan skor rata-rata Indonesia turun dari 63 menjadi 62. Meski demikian, Pilar 1 (kerangka regulasi) justru mengalami peningkatan signifikan menjadi 65,61, sementara Pilar 2 (pelayanan publik) dan Pilar 3 (efisiensi operasional) mengalami penurunan. Dari sepuluh topik yang diukur, tiga topik meningkat (Business Entry, Financial Services, Market Competition), sedangkan tujuh lainnya menurun, terutama Labor (-12) dan International Trade (-6). Secara global Indonesia berada pada peringkat 47 dari 101 negara, dan di ASEAN berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam, namun masih di atas Filipina, Kamboja, dan Timor Leste.

Dengan mempertimbangkan penetapan target maksimal 80% pada tahun 2025, seluruh indikator kinerja Direktorat mencapai 125% dan dikategorikan sangat baik. Ketiga indikator strategis—peningkatan daya saing investasi, harmonisasi regulasi perizinan berusaha, dan sinkronisasi kebijakan investasi—seluruhnya memenuhi target melalui pencapaian masing-masing satu rekomendasi yang dinilai bernilai strategis dan berdampak langsung terhadap ekosistem investasi.

Secara keseluruhan, kinerja PIPM pada tahun 2025 menunjukkan kesinambungan dengan capaian periode sebelumnya namun berada dalam kerangka metodologi evaluasi yang jauh lebih komprehensif melalui B-Ready. PIPM berhasil memainkan peran sebagai penghubung kebijakan, perumus rekomendasi strategis, fasilitator penyelesaian isu regulasi, serta mitra teknis bagi kementerian/lembaga dalam memastikan tercapainya reformasi iklim usaha nasional secara terukur, terarah, dan berkelanjutan.

- b. Pada tahun 2025 Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah ditargetkan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Adapun capaian pengujung di tahun 2024

yaitu sejumlah 18.770 pengunjung, dan pada tahun 2025 jumlah pengunjung tercatat sejumlah 22.342 pengunjung atau mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 19,03% dari tahun sebelumnya, atau mencapai 190,3% dari target tahun 2025 yang ditetapkan, Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah melalui *Website* PIR (<https://regionalinvestment.bkpm.go.id/>) efektif.

- c. Pada tahun 2025, realisasi kesepakatan kemitraan usaha antara Usaha Besar dengan UMKM dalam rangka fasilitasi penanaman modal mencapai Rp 2.008.017.123.000. Pencapaian realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1.906.051.282.170 atau meningkat 5,35% melebihi target Renstra sebesar 5,00%. Pelibatan UMKM dalam proses investasi ini akan terus dilakukan di masa mendatang sehingga kualitas UMKM di Indonesia dapat bersaing di pasar global. Diterbitkannya Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sekaligus Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 220 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha baik Usaha Besar maupun UMKM dalam merealisasikan kemitraan, sehingga diharapkan realisasi kesepakatan kemitraan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dalam peraturan menteri dan keputusan menteri ini telah diatur diantaranya mengenai kepastian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemitraan. Usaha Besar yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku harus menyampaikan laporan realisasi kemitraan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala setiap triwulan. Kewajiban ini diiringi juga dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi Usaha Besar yang tidak atau belum sepenuhnya merealisasikan kewajiban kemitraan
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal.
Capaian atas nilai kepercayaan pelaku usaha/penanam modal melalui Indeks kualitas iklim Penanaman modal (Indeks) dilihat dari dinilai dari indeks kualitas iklim penanaman modal yaitu 3,6 (sangat baik) sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,6 berdasarkan kategori penilaian pelayanan publik KEMENPAN-RB No.14/2017 masuk dalam kategori Sangat Baik dalam nilai skala (3,5 sd. 4,0).



3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat dilihat dari indikator dibawah ini:
 - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 sebesar 77,70 atau 97,1% (Baik) dari target 80,00%.
 - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 sebesar 100,00% atau 114,9% (Sangat Baik) dari target 87,00%.
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Tahun 2025 sebesar 83,57% atau 94,9% (Baik) dari target 88,00%.
 - d. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Tahun 2025 sebesar 0,38% atau 92,4% (Baik) dari target 5,00%.

Tidak ada temuan kesalahan administrasi dan pengelolaan anggaran pada Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan baik pada tahun 2024 (sangat baik)



Table 9 Perbandingan IKU tahun 2024 dan IKU tahun 2025

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
TAHUN 2024								TAHUN 2025					
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	1	Kontribusi UMKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41,2	32,17	77,91	Baik	1					
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,6	3,6	100	Sangat Baik	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,60	3,61	100,28	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	3	Jumlah hari dalam memulai usaha	2,5	2,5	100	Sangat Baik	3					
		4	Jumlah Prosedur dalam memulai usaha/starting a bussines (prosedur)	2	2	100	Sangat Baik	4					
		5	Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)	32,5	31,4	97	Baik	5	Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%)	5,00	5,35	107,00	Sangat Baik
		6	Persentasi Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Investasi yang ditindaklanjuti (%)	2 rekomen dasi (100%)	8 rekomenda si	400	Sangat Baik	6	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang	80,00	100,00	125,0	Sangat Baik



SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
TAHUN 2024								TAHUN 2025					
									ditindaklanjuti (%)				
		7	Presentasi Peningkatan profil Daerah yang dimanfaatkan (%)	90	106	106	Sangat baik	7	Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah	10,0	19,03	190,30	Sangat Baik
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Skala)	4	86,6/skala 4	100	Sangat Baik	8	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat/nilai)	80,00	77,70	97,13	Baik
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan iklim Penanaman Modal	80	76,40	95,50	Sangat Baik	9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	87,00	100,00	114,94	Sangat Baik



SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
TAHUN 2024								TAHUN 2025					
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	86	88,28	102,65	Sangat Baik	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	88,00	83,57	94,97	Baik
		11	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputy Bidang Pengembangan Iklim	5	0	100	Sangat Baik	11	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5,00	0,38	110,00	Sangat Baik

Ket:

1. Indikator Kinerja ini tidak dilanjutkan kembali pada tahun 2025 dikarenakan kontribusi realisasi investasi dari pelaku UMKM terhadap capaian realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepenuhnya menjadi kontribusi dari Kedeputian Bidang Pelaksanaan Penanaman Modal, Direktorat Pemberdayaan Usaha tidak berkontribusi secara langsung.
2. Indikator Kinerja ini tidak dilanjutkan kembali pada tahun 2025 dikarenakan pada tahun 2025 realisasi kemitraan disempurnakan yaitu didasarkan pada persentase kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM terhadap komitmen kemitraan dari Usaha Besar.
3. Indikator Kinerja Presentasi Peningkatan profil Daerah yang dimanfaatkan tahun 2024 mengalami perubahan target menjadi Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah pada tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk lebih mengakomodir profil potensi maupun peluang penanaman modal di daerah selain itu juga secara target terus mengalami peningkatan.
4. Indikator kinerja Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%) mengalami perubahan target yang semula 2 rekomendasi menjadi 80%. Perubahan menggunakan persentase tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diterbitkan, sehingga target dibuat 80% untuk mencerminkan ukuran kinerja yang lebih proporsional dan realistis sesuai beban kerja yang meningkat.

a. Perbandingan Kinerja Anggaran 2024 dan 2025

Evaluasi dan analisis capaian kinerja satuan kerja Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilakukan dengan menganalisis capaian setiap indikator kinerja yang di bandingkan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025. Selain itu, analisis juga dilakukan melalui perbandingan terhadap capaian indikator kinerja yang sejenis pada tahun sebelumnya. Penyampaian penjelasan terhadap capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja satuan kerja Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman untuk perbandingan kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

3.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah di Renstra

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029, diharapkan pengembangan iklim investasi dapat terus dilakukan sehingga mendorong kemudahan berusaha yang lebih efektif guna menciptakan iklim investasi yang semakin menarik dan kompetitif. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Direktorat Deregulasi Penanaman Modal dalam rangka penyederhanaan jumlah hari dan jumlah prosedur dalam memulai usaha serta Direktorat Pemberdayaan Usaha melalui program dengan indikator kinerja program “perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM” sebagai dukungan terhadap sasaran “Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal” sebagaimana terlampir pada Tabel 3.2 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bermilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata	1. Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder	Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal	1. Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran 2. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri 3. Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal	Meningkatnya tata kelola, deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	N/A	80	80,5	81	81,5	82
	2. Nilai realisasi penanaman modal				Persentase peningkatan kemitraan usaha besar PMA/PMDN dengan UMKM	%	N/A	5	5,25	5,5	5,75	6
	3. Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM				Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah	%	N/A	10	11	12	13	14
	4. Nilai PMA berorientasi ekspor											
	5. Nilai PMDN berorientasi ekspor											
	6. Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan											
	7. Kontribusi realisasi investasi luar Jawa											

Gambar 4 Arah Kebijakan Strategis, Sasaran Program, Indikator kinerja Program dan target Indikator Kinerja Program Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti

Indikator Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran

kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran program meningkatnya kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Perumusan kebijakan yang berkualitas menuntut adanya proses pengkajian yang mendalam, kolaborasi antar-instansi, dan kemampuannya untuk diimplementasikan oleh pemangku kepentingan terkait. Tingginya persentase tindak lanjut menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh Deputi memiliki relevansi, akseptabilitas, dan tingkat implementasi yang tinggi dalam kerangka regulasi dan praktik investasi nasional. Dengan semakin efektifnya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, maka hambatan regulasi dapat teratasi, efisiensi perizinan meningkat, dan secara keseluruhan, kualitas iklim investasi akan membaik. Untuk itu, indikator ini tidak hanya mencerminkan jumlah dokumen rekomendasi yang disampaikan, namun demikian, hal ini juga menggambarkan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki tingkat efektifitas yang memadai untuk diterapkan dalam mengatasi hambatan regulasi, meningkatkan efisiensi proses perizinan, serta memberikan kontribusi langsung terhadap perbaikan iklim penanaman modal dan penguatan daya saing investasi.

2. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Indikator Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal merupakan salah satu ukuran kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran program Tersedianya informasi potensi dan peluang penanaman modal yang terstandardisasi dan terintegrasi di dalam website PIR <https://regionalinvestment.bkpm.go.id>. Ketersediaan profil potensi dan peluang penanaman modal yang komprehensif adalah kunci untuk mengarahkan investasi ke sektor dan daerah yang diprioritaskan, termasuk mendukung program hilirisasi. Indikator ini menuntut bahwa profil yang disusun (meliputi data sektoral, potensi wilayah, dan proyek siap investasi) harus valid, up-to-date, dan mudah diakses oleh calon investor, baik domestik maupun asing. Peningkatan pemanfaatan ini diukur dari seberapa sering dan seberapa efektif informasi tersebut digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan profil, maka akan terjadi peningkatan keselarasan antara minat investor dengan prioritas nasional. Untuk itu, indikator ini tidak hanya mencerminkan jumlah profil yang diterbitkan, namun juga menggambarkan efektivitas kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi investasi, serta kualitas dokumen yang mampu menarik minat dan mempercepat proses realisasi investasi.

3. Persentase peningkatan kemitraan usaha besar PMA/PMDN dengan UMKM



Indikator Persentase peningkatan kemitraan usaha besar PMA/PMDN dengan UMKM merupakan salah satu ukuran kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran program Meningkatkan tata kelola pemberdayaan usaha bidang penanaman modal. Penguatan tata kelola pemberdayaan usaha menuntut adanya mekanisme kemitraan yang memiliki regulasi yang pasti, prosesnya mudah, dan dapat diakses lebih luas oleh pelaku usaha di daerah. Dengan semakin jelasnya kerangka regulasi dan semakin mudahnya proses kemitraan diakses oleh pelaku usaha, maka efektivitas tata kelola pemberdayaan usaha dalam konteks penanaman modal dapat meningkat secara signifikan. Untuk itu, indikator dimaksud tidak hanya mencerminkan peningkatan jumlah hubungan usaha yang terbentuk, namun juga menggambarkan kualitas ekosistem kemitraan yang semakin tertata, terstandarisasi, dan responsif menjawab kebutuhan pelaku usaha.

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada tahun 2025 sebesar Rp 8.167.446.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.110.024.224 atau 99,30% dari total alokasi. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target yang direncanakan. Pelaksanaan anggaran telah mengalami beberapa penyesuaian, antara lain dengan adanya penghematan dalam rangka efisiensi dan penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

3.3. Capaian Kinerja Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran 2025 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Table 10 Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) Deputi PIPM Tahun 2025

No	Direktorat	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Deregulasi Penanaman Modal	PBB.021	Peningkatan Daya Saing Investasi	1.520.000.000 setelah pemblokiran dalam rangka efisiensi menjadi 706.367.000	705.544.148	99,88
		PBB.022	Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	1.500.000.000 setelah pemblokiran dalam rangka efisiensi menjadi 1.843.741.000	1.838.898.137	99,74
		PBB.023	Sinkronisasi Kebijakan Investasi	4.593.115.000 setelah pemblokiran dalam rangka efisiensi menjadi 135.599.000	126.370.000	93,19
Total Direktorat Deregulasi Penanaman Modal				2.685.707.000	2.670.812.285	99,45
2	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	FBA.021	Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	2.952.942.000 setelah pemblokiran dalam rangka efisiensi menjadi 887.651.000	883.950.335	99,58



		UBA.021	Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi Rendah (SP SABA)	1.494.550.000	1.486.177.839	99,44
Total Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah				2.382.201.000	2.370.128.174	99,49
3	Pemberdayaan Usaha Nasional	BDG.021	Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Nasional (SP SABA)	1.998.852.000	1.980.526.164	99,08
		BMA.021	Pemetaan Database Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra dan Pelaku UMKM di Daerah yang Siap Dimitrakan (SP SABA)	499.937.000	497.779.881	99,57
		QDG.022	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok	3.000.000.000 setelah pemblokiran dalam rangka efisiensi menjadi 600.749.000	590.777.720	98,34
Total Pemberdayaan Usaha Nasional				3.099.538.000	3.069.083.765	99,02
Realisasi Anggaran PIPM				8.167.446.000	8.110.024.224	99,30

Penyerapan anggaran pada Satker Kedeputan Bidang PIPM pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 99,30%. sementara yang tidak dapat direalisasikan sebesar 0,70% yang merupakan sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan maupun dioptimalisasikan. Dari sisi pelaksanaan kegiatan seluruhnya dapat terlaksana sesuai rencana kinerja. namun dari sisi pelaksanaan anggaran terdapat efisiensi.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: data capaian, capaian IK, data pagu anggaran dan data realisasi anggaran, dengan rincian yang dapat dilihat pada table 11 berikut:

Table 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputi PIPM Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	Capaian IK (%)	Efisiensi (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	1 Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	2.185.707.000	2.170.812.285	99,32	110,00	10,68
		2 Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah (%)	1.940.539.161	1.928.466.335	99,38	110,00	10,62



		3	Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%)	2.755.124.000	2.726.749.423	98,97	107,00	8,03
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	4	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	261.661.839	261.661.839	100,00	100,28	0,28
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	255.000.000	255.000.000	100,00	97,13	-2,87
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	340.000.000	340.000.000	100,00	110,00	10,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	170.000.000	170.000.000	100,00	94,97	-5,03
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	259.414.000	257.334.342	99,20	110,00	10,80
Jumlah				8.167.446.000	8.110.024.224	99,30	104,92	5,63

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya, jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputi PIPM Tahun 2025, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjukkan kinerja yang secara umum cukup efisien, terdapat efisiensi sebesar 5,63%, yang diperoleh dari selisih antara capaian Indikator Kinerja (IK) sebesar 104,92% dengan realisasi anggaran sebesar 99,29% (Rp8.110.024.224 dari alokasi Rp8.167.446.000). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penyerapan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, satuan kerja mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan, sehingga penggunaan sumber daya dapat dikategorikan sangat efisien.



Forum Peningkatan Kompetensi UMKM

UMKM Itu Global, Kreatif, Berkualitas, dan Siap Ekspor

Sabtu, 31 Agustus 2024

BIGN IT



EST. 2009

WILL NEVER LOSE



WELCOME TO WHALE SHARK BOTUBARANI

**Kawasan
Konservasi
Perairan
Teluk Gorontalo**

The Whale Shark Wonders of Gorontalo

Hiu Paus (Rhincodon typus) merupakan jenis ikan di dunia dan termasuk hewan dilindungi. Hiu Paus memakan plankton dan hewan-hewan kecil, hiu paus mencapai 12 meter dengan bobot hingga 21 ton. Hiu Paus ini tinggal di perairan tropis dan subtropis, hiu paus ini menghuni di samudra tropis dan berumur panjang, dan dapat hidup hingga 70 tahun.

BONEBOL LEGENDA
Pariwisata Alam Gorontalo

Let's Explore

@update_hiu_paus_gorontalo
@sihiupaus



BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Meningkatkan tata kelola administrasi melalui e-office
Pemanfaatan e-office merupakan transformasi digital yang memberikan nilai tambah operasional dan efisiensi proses bisnis utama unit kerja. dimana e-office memungkinkan pencatatan surat masuk, disposisi dan tindak lanjut persuratan dapat dilacak oleh pejabat dan staf di seluruh unit kerja Kedeputan bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Penguatan proses bisnis tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, mempercepat koordinasi lintas unit, serta menjamin konsistensi pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan melalui aplikasi SAKTI. SMART. EMONEV BAPPENAS
Pelaporan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Akuntabel dan bertanggungjawab antara lain melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. aplikasi monitoring dan evaluasi EMONEV BAPPENAS.
3. Meningkatkan tata kelola pelaporan kinerja melalui Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB)
SIMANTAB adalah sebuah instrumen yang memuat rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengihktisan, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan unit Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Implementasi SIMANTAB mendukung berjalannya proses manajemen akuntabilitas kinerja unit Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sehingga secara strategis tujuan organisasi dapat tercapai. Pada tahun 2024 seluruh pelaporan kinerja organisasi unit Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sudah memanfaatkan SIMANTAB.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola promosi investasi melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Regional (PIR)
Pemanfaatan Sistem Informasi Potensi Investasi Regional (PIR) merupakan salah satu upaya strategis Kedeputan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola data potensi unggulan serta peluang investasi secara nasional. Sistem PIR berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk menyajikan informasi peluang investasi, potensi unggulan daerah, serta kesiapan pemerintah daerah—khususnya pemerintah provinsi—dalam menyambut calon investor. Melalui sistem ini, informasi investasi disusun secara terstandar, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diakses secara terbuka oleh pemangku kepentingan, sehingga

mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data.

Dalam implementasinya, Sistem PIR dilengkapi dengan berbagai menu pendukung, antara lain menu profil daerah, peluang investasi, hilirisasi, serta laporan pengunjung. Keberadaan menu laporan pengunjung memungkinkan unit kerja untuk memantau tingkat ketertarikan investor terhadap daerah dan sektor tertentu secara terukur, sementara menu profil daerah dan peluang investasi mendorong peningkatan kualitas penyajian informasi yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, sistem ini berperan sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi data antara pusat dan daerah dalam rangka promosi investasi, sehingga proses promosi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mencerminkan kesiapan daerah secara administratif, regulatif, dan kelembagaan. Dengan demikian, Sistem PIR berkontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola promosi investasi yang lebih efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Kinerja

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas isu iklim penanaman modal dan kebijakan investasi, Kedeputian PIPM memandang penguatan kapasitas sumber daya manusia dan budaya kinerja sebagai bagian integral dari peningkatan akuntabilitas kinerja. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi, sharing knowledge, serta penguatan pemahaman terhadap kebijakan strategis dan sistem akuntabilitas kinerja.

Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Kedeputian PIPM secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan berbagai inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja tersebut, Kedeputian PIPM diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

6. Memberikan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja dalam Sosial Media

Menggunakan media sosial untuk secara aktif memperbarui informasi mengenai kegiatan unit kerja merupakan langkah strategis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini memungkinkan publik untuk mengetahui, memahami, dan memantau pelaksanaan tugas, program, serta capaian kementerian secara transparan dan real-time. Dengan memperbarui kegiatan secara rutin, kementerian dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Media sosial memungkinkan dua arah komunikasi, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan umpan balik, kritik, atau saran. Ini membantu unit kerja untuk lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, dengan menunjukkan apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh unit kerja, masyarakat dapat melihat bukti nyata kinerja. Hal ini meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap unit kerja.

7. Fasilitasi kemitraan UMKM menuju Pasar Ekspor

Dalam rangka memfasilitasi UMKM menuju pasar ekspor, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung diantaranya:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemilihan UMKM unggulan,
- b. Kurasi atas produk UMKM unggulan disesuaikan dengan minat pasar dan standar produk negara tujuan ekspor. Kurasi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kurasi tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk:
 - 1) Memastikan UMKM dengan produk berkualitas dan sesuai standar pasar. Produk yang konsisten dalam kualitas lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki potensi loyalitas pasar,
 - 2) Memenuhi standar tertentu terkait kualitas, keamanan, dan estetika produk,
 - 3) UMKM memiliki kapasitas produksi yang dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih luas dan memiliki potensi untuk berkembang, baik secara geografis maupun segmentasi pasar, dan UMKM memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen
- c. Showcasing produk UMKM unggulan di pameran internasional negara tujuan ekspor.

Selain itu, pelaksanaan fasilitasi kemitraan ini juga bertujuan untuk:

- 1) Membuka akses pasar internasional bagi UMKM dengan bertemu langsung calon buyer luar negeri
- 2) Membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan melalui kontrak dagang, kerja sama distribusi, dan skema kemitraan jangka panjang
- 3) Meningkatkan kesiapan ekspor UMKM karena harus menyesuaikan produk dengan standar global/negara tujuan ekspor
- 4) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMKM karena UMKM harus meningkatkan mutu, konsistensi produksi dan branding produk.



Scope of Works (SoW)

Cleaning Services: pembersihan area kerja, toilet, kamar, gudang, dan area publik.
Security Services: pengawal malam, patroli area, pengawasan lokasi.
Catering: Penyediaan makanan dan minuman untuk acara dan kegiatan.
Waste Management: pengumpulan, pemisahan, dan pengangkutan limbah.
Uniform & Furniture: pengadaan, perawatan, dan distribusi seragam serta furnitur.
Mineral Water Supplier: penyediaan galon air mineral berlabel.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan unit Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan ketersediaan dan pemutakhiran data potensi investasi daerah. Proses pengumpulan dan pembaruan data potensi investasi daerah masih menghadapi kendala, terutama akibat sering terjadinya pergantian pejabat maupun admin pengelola Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) di daerah. Kondisi ini menyebabkan kesinambungan pengelolaan data terganggu serta memperlambat proses pemutakhiran informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan promosi dan perencanaan investasi.
2. Kualitas penyusunan kajian potensi dan peluang investasi daerah yang belum seragam. Dokumen kajian potensi dan peluang investasi yang disusun oleh daerah belum sepenuhnya mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya standar kualitas, kelengkapan, dan kedalaman informasi yang disajikan dalam dokumen potensi investasi daerah.
3. Masih rendahnya pemanfaatan data potensi dan peluang investasi pada portal PIR.
4. Dinamika perubahan regulasi lintas sektor. Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat dan melibatkan banyak sektor menuntut koordinasi kebijakan yang presisi antar kementerian/lembaga dan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Peluang pekerjaan yang ditawarkan perusahaan PMA/PMDN belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan kemampuan atau kompetensi UMKM belum optimal, sehingga kemitraan yang dilakukan belum efektif dan berkelanjutan. Untuk itu pemetaan kebutuhan sektor bidang usaha atas kompetensi UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM.
6. Progres dari hasil rencana kemitraan investasi dalam kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*) belum secara maksimal ditindaklanjuti. Pengembangan Subsistem Kemitraan di Sistem OSS serta fitur pelaporan realisasi Kemitraan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diharapkan mampu meningkatkan



pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi kemitraan, sehingga meningkatkan realisasi kemitraan yang menjadi komitmen dan kewajiban dari Usaha Besar.

Keterbatasan sumber daya antara lain kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia serta dukungan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan perbaikan iklim investasi yang semakin luas dan dinamis

5.2. Saran

Langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk memperbaiki hambatan dan kendala tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi di daerah sehingga mempercepat proses dalam melakukan update data potensi investasi daerah.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan diseminasi panduan penyusunan potensi dan peluang investasi daerah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan data potensi dan peluang investasi pada portal PIR dengan memberikan data kunjungan dan jumlah pengunduh kepada Kedeputan Promosi Penanaman Modal untuk ditindaklanjuti.
4. Peningkatan koordinasi antara kementerian, lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menyederhanakan, menyelaraskan, dan menyinkronkan peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.
5. Pelaksanaan diseminasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan regulasi yang ada, serta disesuaikan dengan kegiatan unit agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara maksimal tanpa mengabaikan kegiatan lainnya.
6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar, bentuk kegiatan ini dapat berupa bimbingan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dalam hal perolehan perizinan, permodalan, hingga akses pasar baik ke dalam maupun luar negeri.
7. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (*follow up*) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerjasama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi UKM.
8. Diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan, sehingga dapat diperoleh adanya saran dan masukan baik dari Usaha Besar, UMKM, asosiasi dunia usaha, dan *stakeholder* lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan yang lebih berkualitas.
9. Diperlukan adanya koordinasi dengan K/L/D yang terkait dengan



pelaksanaan kemitraan.

10. Pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi untuk menunjang efektif dan efisiensi serta melakukan pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi terkini di Unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
11. Perlu antisipasi perubahan DIPA tahun berjalan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif.

SI DAN HILIRISASI/BKPM



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

ISMAIL SALEH



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

LAMPIRAN



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Riyatno**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal



Riyatno



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	1	Persentase penyelesaian peraturan menteri dan/atau keputusan menteri terkait iklim penanaman modal (%)	80,00
		2	Persentase peningkatan profil penanaman modal dan hilirisasi di daerah yang dapat dimanfaatkan (%)	10,00
		3	Persentase realisasi kesepakatan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (%)	32,00
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	4	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,60
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	87,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	88,00
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5,00





Program : Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 10.528.946.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	2.982.792.000
2	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	2.698.996.000
3	Pemberdayaan Usaha Nasional	4.847.158.000
Total Anggaran Tahun 2025		10.528.946.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal



Riyatno



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Riyatno**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal



Riyatno

PK Revisi 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM
(REVISI 1)

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	1	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		2	Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah (%)	10,00
		3	Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%)	5,00
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	4	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,60
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	87,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	88,00
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5,00

PK Revisi 1





Program : Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 10.528.946.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	2.982.792.000
2	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	2.698.996.000
3	Pemberdayaan Usaha Nasional	4.847.158.000
Total Anggaran Tahun 2025		10.528.946.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal



Riyatno

PK Revisi 1



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL**

Jl. Gatot Subroto No.44
Jakarta Selatan 12190
Telp. 021 5252008
Email. tudep.pipm@bkpm.go.id